



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas asistensi Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 38) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 September 2022
BUPATI BULUNGAN,

ttd
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd
RISDIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2020 TENTANG *ROAD
MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Buku Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulungan 2020-2024 dapat berjalan dengan lancar.

Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan oleh birokrat sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya pemahaman dan kepedulian serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Masyarakat menghendaki adanya perubahan pada birokrasi ke arah terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah.

Kita menyadari mereformasi birokrasi Kabupaten Bulungan bukan pekerjaan yang mudah. Karena hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja ribuan orang pegawai. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang akan ditemui, maka dalam hal ini diperlukan komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Dokumen Road Map ini memberikan arah bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan serta memberikan informasi mengenai sasaran, indikator dan target kinerja, dan program/kegiatan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada semua pihak yang memerlukan.

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Setiap permasalahan yang terjadi dalam Pemerintahan harus segera diperbaiki dengan langkah-langkah yang sistematis dan baik, hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan juga harus segera didapatkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun dapat dicapai dengan baik.

Reformasi Birokrasi sangat penting untuk diimplementasikan oleh setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi melayani dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bulungan baru tahun 2019 menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, dan pada tahun 2020 Road Map RB dilakukan revisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Road Map Reformasi Birokrasi ini akan semaksimal mungkin untuk diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai dari penguatan Tim Reformasi Birokrasi, monitoring dan evaluasi kontinyu atas Road Map Reformasi Birokrasi dan implementasinya, pembentukan agen perubahan dan role model, pembinaan dan pelatihan bagi agen perubahan, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pada Tata Laksana Pemkab Bulungan berusaha meningkatkan kualitas penataan laksana diantaranya dengan penyusunan Peta Proses Bisnis, evaluasi dan peningkatan kualitas Standar Operasional Prosedur (SOP dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dilaksanakan dengan didukung beberapa kegiatan diantaranya melakukan evaluasi secara kontinyu terhadap Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan, Kelas Jabatan, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, informasi kepegawaian yang akurat, penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya, dan administrasi kepegawaian yang tepat waktu serta penataan pola karir PNS.

Pada Area Penguatan Pengawasan beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang adalah pelaksanaan audit, pembentukan satgas SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, kepatuhan LHKASN dan Kepatuhan LHKPN sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi.

Pada area Penguatan Akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bulungan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan Nilai SAKIP Pemkab Bulungan dengan didukung beberapa kegiatan diantaranya Asistensi penerapan SAKIP disamping untuk Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri juga untuk Perangkat Daerah dilakukan juga penguatan SAKIP-nya, kegiatan pendukung SAKIP lainnya diantaranya Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Rencana Aksi yang semuanya merupakan bagian dari SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Road map Reformasi Birokrasi ini berupaya meningkatkan kualitas SAKIP yang lebih baik ke depannya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini berusaha ditingkatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, salah satunya dengan penyusunan standar pelayanan publik dan implementasinya, dengan standar pelayanan yang baik maka kualitas pelayanan publik juga akan lebih baik. disamping itu, *win-win solution* juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, diantaranya dengan dibuatnya inovasi-inovasi pelayanan publik untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga direncanakan akan membuat Mall Pelayanan Publik yang akan semakin memanjakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dan sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2024 dibuat dengan tujuan untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta melayani dengan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian outcome dari reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3
1.3	Tujuan	5
1.4	Kegunaan.....	6
1.5	Sistematika Penulisan	6

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

2.1	Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan	9
2.2	Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan	13
2.3	Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan.....	17

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN BULUNGAN

3.1	Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	22
	3.1.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi	22
	3.1.2 Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	22

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1	Monitoring	28
4.2	Evaluasi.....	28

BAB V	PENUTUP.....	29
--------------	---------------------	-----------

LAMPIRAN

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2020-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi,

berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi tercantum dalam lembaran **Grand Design**.

Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan

dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

1. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari reformasi birokrasi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yaitu:



Adapun hasil yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
2. Sistem, proses bisnis dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;

3. SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
4. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

1.2 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi kedalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing- masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut program-program pada tingkat mikro:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tatalaksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPRBN dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda. Ada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

Tim Reformasi Pemerintah Daerah terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua tim Pengarah adalah Bupati, sekretaris tim adalah Sekretaris Daerah dan beberapa anggota tim pejabat eselon II pada Perangkat Daerah yang selalu berhubungan dengan area perubahan reformasi birokrasi, guna memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana diketuai oleh Sekretaris Daerah, sekretaris Tim adalah pejabat eselon II dan anggota tim pejabat lain sesuai kebutuhan.

Guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014 mewajibkan setiap Kabupaten/Kota melaksanakan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Bulungan melaksanakan Reformasi Birokrasi baru dimulai pada tahun 2019, dan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi juga dilakukan pada tahun 2019, namun dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka dilakukan perubahan kembali terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan menyesuaikan pada Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2020.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak terlepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulungan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada. Nama rencana program/kegiatan tersebut menyesuaikan dengan istilah nasional dan waktu berlakunya rencana tersebut yaitu Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Bulungan 2020-2024.

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan 2020-2024 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan selama 5 (lima) Tahun kedepan sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas dalam usaha menuju Good Governance.

Road Map Reformasi Birokrasi juga disusun dengan tujuan agar dapat dipergunakan oleh pelaksana reformasi birokrasi sebagai pedoman dan langkah konkrit dalam menjalankan strategi, program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

1.4 KEGUNAAN

Kegunaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan 2020-2024 adalah:

1. Menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
2. Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Bab IV Monitoring dan Evaluasi

Bab V Penutup

Bab	Judul dan Isi
	<p>Ringkasan Eksekutif</p> <p>Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, <i>Quick wins</i>, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.</p>
Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.</p>
Bab II	<p>Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan</p> <p>1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintah bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan public, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai / sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.</p> <p>2. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan</p> <p>Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan</p>
	<p>3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah</p> <p>Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.</p>

Bab III	Agenda Reformasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan 1. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi 2. Sasaran/Hasil yang diharapkan 3. Kegiatan-kegiatan
Bab IV	Monitoring dan Evaluasi
Bab V	Penutup
	Lampiran

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu:

- a) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel;
- b) Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien; dan
- c) Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai / sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut:

a) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

1) Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Tahun sebelumnya proses pengusulan untuk masuk dalam zona integritas belum dapat dilaksanakan dikarenakan pemahaman terhadap implementasi zona integritas sendiri masih sangat minim, selain itu sosialisasi terhadap pelaksanaan zona integritas belum didapat oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Pengusulan Zona Integritas direncanakan diusulkan pada tahun 2020, unit yang diusulkan adalah :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Nilai Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pada saat ini upaya efisiensi sudah dilakukan sejak mulai perencanaan anggaran, yaitu dengan mencermati kembali rencana penggunaan anggaran pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna mengurangi alokasi-alokasi anggaran dan besarnya yang kurang tepat. Selain itu ada upaya juga efisiensi

belanja modal pada saat pengadaan barang/jasa. Namun belum ada data yang menunjukkan nilai efisiensi penggunaan anggaran.

3) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

IPAK adalah instrument pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency International* Indonesia. Dalam hal ini, survey IPAK Kabupaten Bulungan dilakukan secara langsung oleh Badan Pusat Statistik.

4) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat professional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bulungan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020 bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu masih harus ditingkatkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5) Penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial

Temuan pemeriksaan yang bersifat finansial cenderung menurun.

6) Capaian e-proc 97,64% dari jumlah paket yang dilelangkan

Tahun 2018 lelang secara elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, dari Paket Dilelang 85 Paket terdapat 83 Paket Selesai Lelang 2 Paket Gagal Lelang.

7) Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2019 mendapat nilai 60,12 dengan kategori B, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan akan terus ditingkatkan kedepannya untuk mewujudkan Pemerintahan yang akuntable.

b) Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien;

1) Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan

Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan evaluasi jabatan dan telah divalidasi oleh Kemenpan & RB yang menghasilkan kelas jabatan, sehingga kedepannya tunjangan

yang diberikan kepada ASN dapat diberlakukan tunjangan dengan berbasis kinerja.

2) Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan pada saat ini dalam proses penyusunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan kedepannya diharapkan dengan standar kompetensi jabatan ini diharapkan kedepannya pola karir ASN dapat tertata dengan baik, pengangkatan ASN dalam jabatan semakin transparan dan pelaksanaan tugas jabatan dapat dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien.

3) Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

ANJAB dan ABK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah setiap tahun dilaksanakan dan dilakukan evaluasi terhadap ANJAB dan ABK tersebut, adanya ANJAB dan ABK ini menghasilkan rekapitulasi terhadap kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, ANJAB dan ABK telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan akan terus ditingkatkan kualitas penyusunannya.

4) Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 130/13988/ SJ tanggal 13 Desember 2019 Perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan juga ditindaklanjuti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengeluarkan surat nomor B/ 312/ M.SM.02.00/ 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dalam Rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi.

Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 mulai melakukan pemetaan terhadap jabatan administrasi yang akan disetarakan dan difungsionalkan di tahun 2020 sesuai dengan edaran Kemenpan & RB.

5) Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki Visi “Menjadikan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri”.

Dalam mewujudkan Visi, Kabupaten Bulungan merumuskan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan nasional.
- 2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- 3) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
- 4) Pemantapan Kualitas SDM melalui pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis.
- 5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 6) Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan professional serta berorientasi pada pelayanan publik.

c) Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM rata-rata satuan / unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2017 nilainya 77, 94 dengan skala 3,11, untuk meningkatkan IKM kedepannya akan diselenggarakan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan yang akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

2) Integritas Pelayanan

Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk:

1. Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik;
2. Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik;
3. Memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Sebagian besar satuan/unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

3) Tingkat kepatuhan pada Standar Pelayanan

Sebagian besar unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan, dalam survey kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan berhasil masuk dalam Zona Hijau dengan nilai 81,92.

2.2 Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi: 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 2) Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 3) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berikut kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan:

1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

a. Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Harapan terhadap pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah seluruh PD penyelenggara

pelayanan publik dapat menerapkan zona integritas dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi sehingga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan semakin baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima serta bebas dari unsur-unsur korupsi.

b. Nilai efisiensi

Harapan terhadap peningkatan nilai efisiensi (penggunaan anggaran) adalah ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta meningkatkan efisiensi belanja modal dengan penerapan *e-proc* 100% dari paket yang dilelangkan.

c. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Harapan IPK di Kabupaten Bulungan mendapat nilai baik, untuk saat ini belum Pemkab Bulungan belum mendapat survey dari BPS terkait Indeks Persepsi Anti Korupsi dikarenakan terdapat kesalahpahaman ketika melakukan penilaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun sebelumnya sehingga survey Indeks Persepsi Korupsi tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

Diharapkan kedepannya survey IPAK dapat dilaksanakan dan mendapat hasil yang maksimal dan memuaskan yang mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Bulungan bebas dari korupsi.

d. Opini BPK

Harapan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru dicapai di tahun 2020.

e. Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada saat ini sudah mendapat peringkat atau kategori B, namun masih terdapat beberapa sector akuntabilitas yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

Harapan yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat semakin meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mendapat nilai AKIP AA.

2. Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien

a. Implementasi Tunjangan Berbasis Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan dan memiliki kelas jabatan yang dihasilkan dari evaluasi jabatan, dengan adanya kelas jabatan maka akan mempermudah implementasi tunjangan berbasis kinerja.

Harapan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan Kabupaten Bulungan sudah menerapkan tunjangan yang berbasis kinerja dengan baik dan maksimal.

Tunjangan berbasis kinerja menjadi Quick Win Road Map Reformasi Birokrasi mengingat hal ini merupakan langkah awal penguatan disiplin dan pemacu kinerja setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan tentunya dengan implementasi tunjangan berbasis kinerja maka akan mereformasi mindset ASN.

b. Standar Kompetensi Jabatan

Harapan Pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap Standar Kompetensi Jabatan pada 5 (lima) tahun kedepan adalah standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah dimiliki dan diterapkan dengan sangat baik. Implementasi standar kompetensi jabatan akan memperbaiki system pola karir ASN, pengangkatan ASN dalam jabatan dan Profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

c. Penyederhanaan Birokrasi

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 n Oktober 2019 yang ditindaklanjuti oleh surat Kemendagri Nomor 130/ 13988/ SJ Tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan

Surat Kemenpan & RB Nomor : B/ 312/ M.SM.02.00/ 2020 Tanggal 10 Juni 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Dalam Rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota hingga 31 Desember 2020, hal ini menjadikan penyederhanaan birokrasi menjadi Quick Win Mandatory yang harus dilaksanakan.

3. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang adalah hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas skala 3,5. Hal ini akan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan/ pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah baik.

b. Integritas Pelayanan

Kondisi yang diharapkan pada 5 (lima) tahun kedepan adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki integritas pelayanan yang tinggi. Semua penyelenggara / pelayanan publik mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

c. Tingkat Kepatuhan pada Standar Pelayanan

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun yang akan datang adalah penyelenggara pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap implementasi standar pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Setiap Perangkat Daerah dapat masuk dalam zona hijau dengan nilai sangat tinggi diatas 90.

d. Mall Pelayanan Publik

Tanggal 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Bulungan menerbitkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Diharapkan kondisi 5 (lima) tahun kedepan pelayanan publik di Kabupaten Bulungan sudah menjadi pelayanan yang prima.

Mal Pelayanan Publik didirikan dengan bertujuan untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha dan investasi di Kabupaten Bulungan.

Mal Pelayanan Publik menjadi Quick Win Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulungan mengingat masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang terbaik dan prima serta memberikan kemudahan masyarakat dalam berusaha dan memudahkan investor dalam berinvestasi untuk membangun perekonomian Kabupaten Bulungan.

e. Inovasi Pelayanan Publik SEKINJAU SEMISA

Kondisi 5 (lima) tahun kedepan diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bulungan semakin baik dan pelayanan prima. Inovasi pelayanan publik Sekinjau Semisa menjadi Quick Win Reformasi Birokrasi mengingat inovasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan diharapkan menjadi win-win solution.

Sekinjau Semisa yang berarti satu untuk semua merupakan inovasi kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan untuk mempermudah proses pencatatan kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi ibu hamil hingga melahirkan.

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan

Permasalahan yang dihadapi akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. Sesuai prioritas, dari 8 (delapan) area perubahan terpilih 4 (empat) prioritas area perubahan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Permasalahan-permasalahan area manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan antara lain :

- a. Tim Reformasi belum bekerja secara maksimal, masih muncul ego sektoral sehingga mengalami kendala dalam berkomunikasi dalam mengimplementasikan RB, terutama dalam melaksanakan peran masing-masing terhadap pelaksanaan RB.
- b. Belum adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi RB.
- c. Road Map RB baru disusun tahun 2019.
- d. Belum pernah dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan bagi asesor Reformasi Birokrasi.
- e. Role Model dan Agen Perubahan baru dibentuk tahun 2020 dan belum memberikan kontribusi terhadap perubahan di lingkungan instansinya.

2. Deregulasi Kebijakan

Permasalahan-permasalahan deregulasi kebijakan dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan. Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus masih belum maksimal dilaksanakan;
- b. Kebijakan yang diterbitkan belum memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya;
- c. Penyelesaian kebijakan belum disesuaikan dengan Program Legislasi K/L/Pemda.

3. Penataan Organisasi

Permasalahan dalam penataan organisasi adalah :

- a. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi;
- b. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja;
- c. Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok Jabatan Fungsional belum disusun dan ditetapkan pimpinan instansi;

- d. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.

4. Penataan Tata Laksana

Permasalahan yang saat ini masih muncul dalam penataan tata laksana adalah :

- a. Peta Proses Bisnis baru dalam tahap penyusunan di tahun 2020;
- b. Evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP belum menganalisis efisiensi dan efektivitas;
- c. Informasi publik yang bisa di akses masih minim;
- d. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- e. Pemerintah Daerah belum memiliki Arsitektur SPBE;
- f. Pemerintah Daerah belum memiliki Peta Rencana SPBE;
- g. Pemerintah Daerah belum menerapkan Manajemen Layanan SPBE;
- h. Pemerintah Daerah belum memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik;
- i. Pemerintah Daerah belum memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik.

5. Penataan SDM Aparatur

Permasalahan yang dialami dalam melakukan penataan sistem manajemen SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
- b. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai;
- c. Pemutakhiran system informasi kepegawaian masih minim dilakukan;
- d. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi masih dilakukan pada sebagian kecil pegawai;
- e. Penilaian Kinerja individu hanya sebagian kecil yang dijadikan dasar pemberian reward and punishment dan pengembangan individu;

- f. Rencana redistribusi pegawai belum disusun dan diformalkan;
- g. Proyeksi kebutuhan 5 tahun belum disusun dan diformalkan;
- h. Belum diimplementasikannya manajemen Talenta.

6. Penguatan Akuntabilitas

Permasalahan yang dihadapi pada area penguatan akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Belum adanya system pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh setiap unit kerja;
- b. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi masih belum dilaksanakan.

7. Penguatan Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Belum dilakukan public campaign;
- b. Penanganan gratifikasi belum diimplementasikan dengan maksimal;
- c. Belum dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;
- d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi;
- e. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi;
- f. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK;
- g. Evaluasi penerapan SPI belum dilakukan secara berkala;
- h. Penanganan benturan kepentingan belum disosialisasikan dan dilaksanakan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam area peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Belum terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;

- b. SKM dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan hasil SKM belum dapat diakses secara Pelatihan budaya pelayanan prima hanya dilakukan dan disosialisasikan secara terbatas, belum menyeluruh;
- c. Integrasi sarana layanan terpadu belum memenuhi sarana dan prasarana;
- d. Inovasi pelayanan belum pernah mendapatkan penghargaan.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BULUNGAN

3.1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Kinerja” dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntable;
- b) Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien; dan
- c) Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

3.1.2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka diambil 5 (lima) area perubahan dan program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019-2024 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1

5 (lima) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil Yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	a) Tim Reformasi Birokrasi dapat bekerja secara maksimal dan dapat menghilangkan ego sektoral b) Hasil evaluasi RB dilakukan tindak lanjut dan termonitor secara berkala c) Kualitas Tim asesor meningkat dengan dilakukan pelatihan d) Role model dan agen perubahan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam melakukan perubahan di lingkungan instansinya

2.	Deregulasi Kebijakan	a) Evaluasi terhadap kebijakan yang tidak harmonis b) Kebijakan yang di terbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c) Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi Pemda
3.	Penataan Organisasi	d) Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi telah dilaksanakan e) Evalausi atas kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan di setiap instansi f) Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah disusun dan ditetapkan oleh pimpinan serta telah diimplementasikan g) Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok

4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none">a) Tersedianya Peta Proses Bisnis yang akan terhubung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dalam arti Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governanceb) Semua informasi publik dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakatc) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah disusund) Peta Rencana SPBE telah disusune) Manajemen layanan SPBE telah diterapkanf) Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah dilaksanakang) Layanan kearsipan berbasis elektronik telah dilaksanakan
5.	Penataan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none">a) Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai telah dilaksanakanb) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawaic) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah dilakukan kepada seluruh pegawaid) Penilaian Kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward and punishment dan pengembangan individue) Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkanf) Proyeksi Kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkang) Manajemen Talenta telah diterapkan
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none">a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan;b) Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik telah dilaksanakan dan dapat di akses oleh setiap unit kerja;c) Kebutuhan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan.

7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a) Public Campaign Telah Dilaksanakan b) Kebijakan Penanganan Gratifikasi Telah Dilakukan Evaluasi Dan Ditindaklanjuti c) Whistle Blowing System Telah Dilaksanakan Dan Disosialisasikan d) Penanganan Terhadap Benturan Kepentingan Telah Disosialisasikan Dan Dilaksanakan e) Terdapat Unit Kerja Yang Telah Mendapat Predikan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) f) Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a) Terwujudnya pelayanan prima yang sesuai dengan harapan masyarakat b) Telah dilaksanakan pemberian reward and punishment terhadap pemberi layanan c) Telah dilaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan d) Survey Kepuasan Masyarakat telah dilakukan secara berkala e) Inovasi pelayanan publik telah mendapatkan penghargaan nasional

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan
Hasil Yang Diharapkan

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	80% Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulungan telah dilakukan harmonisasi
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi & Penataan Perangkat Daerah	Dapat mewujudkan organisasi yang proporsional dan profesional

3.	Penataan Tata Laksana	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan evaluasi SOP	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
4.	Penguatan Pengawasan	Pembinaan dan Pendampingan Penyampaian e- LHKPN	Mewujudkan Aparatur yang bersih dari korupsi
		Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur	Mewujudkan aparatur yang memiliki pola pikir anti korupsi
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Mewujudkan instansi Pemerintah yang bersih dan tertib administrasi
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan masyarakat
		Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan KDH	Mewujudkan dokumen pelaporan yang berkualitas
		Inventarisasi Temuan Pengawasan	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan tertib administrasi
		Tindaklanjut Temuan Pengawasan	Mewujudkan birokrasi yang bersih
		Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani
		Verifikasi LHKASN	Mewujudkan aparatur yang bebas dari korupsi
5.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja	Mewujudkan birokrasi yang bertanggungjawab
		Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	Mewujudkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan. Mewujudkan budaya kinerja dari level pimpinan

		Asistensi Penerapan SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Mewujudkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat dan mewujudkan birokrasi yang melayani
7.	Quick Wins Reformasi Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi	Menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan Pemerintah kepada publik.
		Tunjangan Berbasis Kinerja	Meningkatkan disiplin dan Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
		Mal Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha serta kemudahan investasi
		Inovasi Pelayanan Publik Sekinjau Semisa	Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi ibu hamil hingga melahirkan dalam menerbitkan dokumen kependudukan mulai dari Akta Kelahiran, KK, KIA.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, monitoring dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan berdasarkan program- program dan kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana aksi reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Tim reformasi birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengetahui kemajuan dan progres pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap area sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan yang telah dilaksanakan oleh penanggungjawab program dan kegiatan tersebut.

Disamping itu, Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap area melalui aplikasi PMPRB yang kemudian hasil PMPRB tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen tahap pertama reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, mengingat Kabupaten Bulungan baru melaksanakan reformasi birokrasi. Dokumen road map reformasi birokrasi ini merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun kedepan yakni 2020-2024.

Dokumen ini tidak akan bermanfaat jika rencana aksi yang telah disusun dalam dokumen ini tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang berhubungan langsung dengan area reformasi birokrasi dapat melaksanakan secara langsung rencana aksi-rencana aksi yang telah tertuang dalam dokumen road map reformasi birokrasi ini dengan penuh tanggungjawab dan dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektoral sehingga dalam pelaksanaan rencana aksi dapat dilaksanakan secara harmonis dan baik.

Road map reformasi birokrasi ini disusun berdasarkan kebutuhan, keinginan dan harapan semua pemangku kepentingan sebagai bentuk upaya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan mewujudkan good governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dokumen road map ini akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi dan road map yang telah disusun agar berjalan sesuai dengan harapan.

Demikian Road Map Reformasi ini disusun sebagai bahan utama implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020-2024

No	Area Reformasi Birokrasi	Hasil Yang Diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggungjawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
I. Manajemen Perubahan											
			1 Tim Reformasi Birokrasi								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota								
	Manajemen Perubahan	Meningkatnya Integritas Aparatur (75% Aparatur dengan Integritas Tinggi)	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Keputusan Bupati Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)
			b. Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Tim RB telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB (8 Dokumen)	√	√	√	√	√	
			c. Rapat Tim Reformasi Birokrasi secara rutin	terlaksananya rapat rutin Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi	Jumlah Rapat Tim dan Pokja Reformasi Birokrasi (4 Kali/ Tahun)	√	√	√	√	√	

			2	Road Map Reformasi Birokrasi								
			a.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan	√		√			Setda (Bagian Organisasi)
			b.	Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi	Tersedianya Quick Wins Reformasi Birokrasi	Jumlah Quick Wins yang disusun (1/ Tahun)	√	√	√	√	√	
			c.	Sosialisasi/ Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Internalisasi/ Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi (2 kegiatan/tahun)	√	√	√	√	√	
		Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Indeks RB 75)	3	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi								Setda (Bagian Organisasi)

			a.	Pembentukan Tim PMPRB	Terbitnya Keputusan Bupati Tentang Tim PMPRB	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)	√	√	√	√	√	
			b.	Melakukan Sosialisasikan PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi PMPRB	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi PMPRB (1 kegiatan rapat/2 bulan)	√	√	√	√	√	
			c.	Melakukan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progres update data dan pengisian PMPRB pada unit kerja terkait	Jumlah rapat penyampaian update data dan pengisian PMPRB (2 Kali/tahun)	√	√	√	√	√	
			e.	Melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil PMPRB	Terlaksananya tindak lanjut hasil PMPRB	Jumlah Rencana Aksi tindak lanjut RB (10 rencana aksi/tahun)	√	√	√	√	√	

				4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja									
				Pembentukan agent of change (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang agen perubahan di lingkungan Pemkab	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)	
				Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan yang disusun (1 (satu) dokumen)	√	√	√	√	√		
				Sosialisasi dan Penguatan Budaya Kerja	Tersedianya Regulasi Budaya Kerja dan telah di implementasikan	Produk Hukum Budaya Kerja	√		√				
						Edaran Core Values BerAKHLAK				√			
						Rata-rata pemahaman ASN terhadap Core Values				√	√	√	
				Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/ tahun)	√	√	√	√	√		

				Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Jumlah dokumen konsep nilai integritas yang disusun (1 (satu) dokumen)	√	√	√	√	√	
				Mendorong keterlibatan pimpinan PD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan SKPD terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	% (persen) Kepala PD yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (75 % (tujuh puluh lima persen))	√	√	√	√	√	
				Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan program/ kegiatan reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan rapat/ bulan + notulen hasil rapat)	√	√	√	√	√	

				<p>Membuat leaflet/banner/ x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll.</p>	<p>Pembuatan/ pemasangan leaflet/ banner/x-banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada PD/unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)</p>	<p>%(persen) PD/Unit Kerja yang membuat/ memasang leaflet/ banner/ x- banner/ spanduk berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll) (95 %)</p>	√	√	√	√	√	
--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--

II. Deregulasi Kebijakan													
	Derebulasi Kebijakan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya (95 %)			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulungan telah dilakukan harmonisasi dan evaluasi	80% Produk Hukum Daerah Kabupaten Bulungan telah dilakukan harmonisasi	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Hukum)

				Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan	Ditetapkannya Rancangan Rancangan menjadi produk hukum daerah	80% Rancangan yang menjadi produk hukum daerah	√	√	√	√	√	
				Penataan Dokumentasi Hukum	Terdokumentasinya dan terpublikasikannya produk hukum daerah	100% Produk hukum daerah yang telah didokumentasikan dan di publikasikan	√	√	√	√	√	
III. Penataan Tata Laksana												
	Penataan Tata Laksana	Meningkatnya kualitas Peta Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah (95% PD telah memiliki SOP yang berkualitas)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas SOP dan Penyusunan Peta Proses Bisnis	95% Perangkat Daerah memiliki SOP berkualitas	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)

				Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Bulungan	Peta Proses Bisnis Kabupaten Bulungan telah tersusun dan diturunkan kepada SOP Perangkat Daerah	Tersedianya Peta Proses Bisnis Kabupaten Bulungan	√	√	√	√	√	
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang telah melakukan evaluasi dan perbaikan SOP	√	√	√	√	√	
				SPBE	Aplikasi yang telah terintegrasi	Persentase aplikasi yang telah terintegrasi (85%)	√	√	√	√	√	DKIP
					Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah disusun							
					Peta Rencana SPBE telah disusun							
					Manajemen layanan SPBE telah diterapkan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,50)	√	√	√	√	√	

					Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah dilaksanakan dan dapat di akses seluruh pegawai	90% Pegawai telah dapat mengakses layanan kepegawaian secara elektronik	√	√	√	√	√		
					Layanan kearsipan berbasis elektronik telah dilaksanakan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik (90%)	√	√	√	√	√		
IV. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur													
	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota								
					Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Standar Kompetensi Jabatan telah di impelementasikan di seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)

				Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Setiap Jabatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan terupdate	Tersedianya dokumen hasil evaluasi jabatan	√	√	√	√	√	
				Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	Anjab Telah dilakukan evaluasi dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peta jabatan dan sesuai dengan pedoman terbaru	Jumlah Anjab yang dilakukan evaluasi	√	√	√	√	√	
				Program Kepegawaian Daerah								
				Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Data Kepegawaian pada Simpeg akurat	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan informasi	√	√	√	√	√	BKPS DM
						Penambahan modul Aplikasi SIMPEG (1)	-	-	√	√	√	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian terupdate	Tersedianya data kepegawaian yang lengkap, akurat dan sesuai keadaan terkini	√	√	√	√	√	

					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Data tata naskah pegawai	Tersedianya data tata naskah pegawai	√	√	√	√	√	
						Setiap PNS telah memiliki Karpeg, Karis, Karsu	Dokumen PNS yang terbit (100%)	√	√	√	√	√	
					Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS yang diberikan penghargaan sesuai data dan akurat	PNS yang diberikan penghargaan (100%)	√	√	√	√	√	
					Program Kepegawaian Daerah								
					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	SKP yang telah di update ke SAPK	√	√	√	√	√	BKPS DM
							Aplikasi Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil	-	-	√	-	-	
							Pembekalan Penilaian Kinerja PNS	√	√	√	√	√	

					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PNS yang diberikan penghargaan sesuai data dan akurat	PNS yang diberikan penghargaan (100%)	√	√	√	√	√	
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terjadi penurunan kasus disiplin PNS	SK sanksi yang terbit dari pembinaan PNS (100%)	√	√	√	√	√	
					Pengelolaan Assessment Center	Assesment sebagai dasar mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi	ASN yang mengikuti assessment/ uji kompetensi	√	√	√	√	√	
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	SDM aparatur kualitasnya meningkat	ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang melaksanakan Tugas Belajar (100%)	√	√	√	√	√	
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi telah sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan	Tersedianya CASN/ASN yang sesuai Formasi (1 Berkas)	√	√	√	√	√	
						Proyeksi Kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	Tersedianya kebutuhan jumlah pegawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (1 Berkas)	√	√	√	√	√	

					Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	Tersedianya data redistribusi pegawai	√	√	√	√	√	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Seleksi CASN sesuai ketentuan	CASN yang lulus seleksi	-	√	-	√	√	
					Semua PNS telah dilakukan pengambilan sumpah janji	PNS yang diambil Sumpah/Janji (100%)	-	-	√	√	√	
					SK pengangkatan CASN dan ASN tepat waktu	SK Pengangkatan CASN dan ASN yang tepat waktu (100%)	-	-	√	√	√	
				Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	ASN yang Mutasi	√	√	√	√	√	
					Manajemen Talenta telah diterapkan	Prosentase Aparatur yang lulus uji sebagai suksesor	√	√	√	√	√	
				Pengelolaan Promosi ASN	Seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur	Peserta yang mengikuti Seleksi Terbuka JPT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (100%)	√	√	√	√	√	

				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	PNS yang memperoleh Kenaikan Pangkat tepat waktu (100%)	√	√	√	√	√	
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK pensiun tepat waktu	SK Pensiun yang telah diterbitkan dan pencairan dana pensiun dan klaim taspen tepat waktu (100%)	√	√	√	√	√	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia								
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan kompetensi ASN	ASN yang lulus diklat teknis/fungsional dan memiliki sertifikasi keahlian	√	√	√	√	√	BKPS DM

				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Penyusunan rencana Kebutuhan pengembangan kompetensi	Kebutuhan pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√	
V. PENATAAN ORGANISASI												
	Penataan Organisasi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota								
				Evaluasi & Penataan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kelembagaan (UPT) telah proporsional dan sesuai dengan kebutuhan	Perangkat Daerah dan Kelembagaan (UPT) yang proporsional dan sesuai kebutuhan (90%)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)

					Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional telah disusun dan ditetapkan oleh pimpinan serta telah diimplementasikan	Persentase PD yang telah menyusun mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional (95%)	√	√	√	√	√		
VI. PENGUATAN PENGAWASAN													
	Penguatan Pengawasan				Program Penyelenggaraan Pengawasan								
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Hasil audit yang ditindaklanjuti	Jumlah Program OPD Yang Di audit Kinerja	√	√	√	√	√	Inspektorat
							Jumlah Desa Yang Diaudit Kinerja	√	√	√	√	√	
							Jumlah OPD Yang Diaudit Ketaatan/PDPT	√	√	√	√	√	
						Terlakssananya audit	Jumlah Kegiatan	√	√	√	√	√	
						Laporan hasil pemantauan	Jumlah OPD Yang di Pantau	√	√	√	√	√	

					Laporan hasil Monitoring	Jumlah Desa Yang di Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	√		
					Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Laporan dumas yang telah ditindaklanjuti	Persentase laporan dumas yang di tindak lanjuti	√	√	√	√	√	
					Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan KDH	LHE	Jumlah Laporan Pelaksanaan reviu	√	√	√	√	√	
							Terbitnya SK Tim SATGAS SPIP	√	√	√	√	√	
					Tindak lanjut Temuan Pengawasan	Temuan selesai ditindaklanjuti	persentase tindaklanjut temuan APIP yang mendapat status penyelesaian tindaklanjut "Selesai (S)"	√	√	√	√	√	
						Temuan selesai ditindaklanjuti	persentase tindaklanjut temuan BPK yang mendapat status penyelesaian tindaklanjut "Selesai (S)"	√	√	√	√	√	

					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi								
					Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Peningkatan progres renaksi pencegahan korupsi	Persentase Progres Tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Aplikasi MCP KPK-RI	√	√	√	√	√	Inspektorat
					Verifikasi LHKASN	wajib Lapor patuh dalam penyampaian LHKASN	Persentase wajib lapor LHKASN yang menyampaikan LHKASN Tepat waktu	√	√	√	√	√	
					Public Campaign	Publik Campaign telah disosialisasikan dan dilaksanakan	Persentase PD yang telah menerapkan Public Campaign (90%)	√	√	√	√	√	
					Whistle Blowing System	Whistle Blowing System telah disosialisasikan dan dilaksanakan	Persentase PD yang telah menerapkan Whistle Blowing System (90%)	√	√	√	√	√	

				Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan dan dilaksanakan	Persentase PD yang telah menerapkan Penanganan Benturan Kepentingan (90%)	√	√	√	√	√	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah memiliki sertifikat	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat dibidang pengawasan	√	√	√	√	√	Inspektorat
						Level Kapabilitas APIP (skala IACM)	√	√	√	√	√	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Pembinaan dan Pendampingan Penyampaian e-LHKPN	Wajib Laport patuh dalam penyampaian LHKPN	Jumlah PN/WL yang menyampaikan e-LHKPN tepat waktu (100%)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)

VII. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA													
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
					Penyusunan Laporan Kinerja	LKIP telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Jumlah Laporan Kinerja Setda yang berkualitas (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)
						LKIP telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	
						LKIP telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja melalui ESR dan E-SAKIP BULUNGAN (90%)	√	√	√	√	√	

					Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	PK telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan yang Berkualitas (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	
						PK telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang Berkualitas (1 Dokumen)	√	√	√	√	√	
						PK telah disusun dan di upload pada aplikasi ESR dan E-SAKIP Bulungan	Perangkat Daerah yang menyampaikan Perjanjian Kinerja melalui ESR dan E-SAKIP BULUNGAN (90%)	√	√	√	√	√	
					Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik	Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik telah dilaksanakan dan dapat di akses semua PD	Persentase PD yang telah menerapkan pengukuran kinerja berbasis elektronik (80%)	√	√	√	√	√	

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Asistensi Penerapan SAKIP	26 PD telah mendapat Asistensi SAKIP dan telah memperbaiki dokumen SAKIP	Jumlah PD yang mendapat Asistensi SAKIP (26 PD)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)
					Nilai SAKIP PD meningkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah minimal B	√	√	√	√	√	
					Nilai SAKIP Pemda meningkat	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (B)	√	√	√	√	√	
VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik												
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	PD telah memiliki standar Pelayanan dan mengimplementasi kannya	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki standar pelayanan (14 PD)	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)

				Program Pelayanan Penanaman Modal									
				Penyelenggaraan mall Pelayanan Publik	Tersedianya Mall Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (90%)	√	√	√	√	√		DPMP TSP
						Jumlah Instansi/ Lembaga yang bergabung pada MPP (21)	-	√	√	√	√		
						Jumlah Pengguna Layanan yang dilayani (4300)	-	√	√	√	√		
				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh unit penyelenggara pelayanan publik telah melaksanakan SKM secara berkala	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki SKM	√	√	√	√	√		

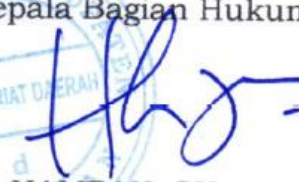
						Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan SKM secara berkala	√	√	√	√	√	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004